ANALISIS KEBIJAKAN

PENGUATAN PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA TARAKAN

Fokus: Penguatan tata kelola data, kelembagaan, standardisasi, integrasi sistem, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Dokumen analisis kebijakan awal untuk bahan perencanaan dan pembahasan Pemerintah Kota Tarakan

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Satu Data Kota Tarakan merupakan kebijakan strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan Satu Data tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan portal atau aplikasi, tetapi merupakan perubahan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam proses produksi data, pengelolaan data sektoral, koordinasi antarperangkat daerah, pemanfaatan data dalam perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi pembangunan, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Tarakan menjadi landasan penting untuk mengembangkan kebijakan ini ke tahap implementasi yang lebih operasional dan terukur.

2. Analisis Situasi dan Permasalahan Kebijakan

A. Kondisi yang Dihadapi

Keberadaan regulasi belum otomatis menjamin tata kelola data berjalan efektif di seluruh perangkat daerah. Tantangan utama bukan hanya menyediakan sistem, melainkan memastikan perangkat daerah memproduksi, mengelola, memperbarui, dan memanfaatkan data dengan tata cara yang sama.

No	Permasalahan	Dampak
1	Data masih dikelola secara sektoral	Data antarperangkat daerah berpotensi berbeda
2	Definisi, indikator, dan format data belum seragam	Data sulit dibandingkan dan diintegrasikan
3	Pembaruan data belum konsisten	Data berisiko tidak mutakhir
4	Metadata belum menjadi bagian wajib proses pengumpulan	Konteks, sumber, dan metodologi sulit dipahami
5	Koordinasi Produsen Data dan Walidata belum optimal	Verifikasi dan validasi berpotensi tidak konsisten
6	Pengelolaan data berorientasi pemenuhan laporan	Data belum maksimal untuk analisis kebijakan
7	Penanggung jawab, jadwal pembaruan, dan standar kualitas belum jelas pada seluruh dataset	Keberlanjutan pengelolaan data sulit dijamin
8	Sistem perangkat daerah belum seluruhnya terintegrasi	Duplikasi input dan pengumpulan data

Catatan: Identifikasi ini merupakan analisis awal, bukan hasil audit atau pengukuran faktual seluruh perangkat daerah. Validasi perlu dilakukan melalui inventarisasi dan evaluasi implementasi Satu Data.

B. Akar Masalah Kebijakan

Dimensi	Fokus masalah
Kelembagaan	Pembagian peran, tanggung jawab, kewenangan, dan komitmen antarperangkat daerah
Data	Standar, metadata, kualitas, validitas, konsistensi, dan pembaruan
Teknologi	Interoperabilitas, integrasi aplikasi, API, keamanan, dan penyimpanan
SDM	Kompetensi pengelola data, operator, statistik sektoral, dan literasi data
Pemanfaatan data	Penggunaan data untuk perencanaan, evaluasi, prioritas, dan pengambilan keputusan

Aspek kelembagaan dan tata kelola perlu menjadi prioritas. Teknologi dapat dibangun, tetapi tanpa kewajiban, jadwal, tanggung jawab, dan mekanisme pengendalian yang jelas, portal berpotensi hanya menjadi tempat unggah data.

3. Analisis Kebijakan Berdasarkan Kondisi Kota Tarakan

A. Analisis Regulasi

Kota Tarakan telah memiliki Perwali Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi tersebut menjadi kerangka penyelenggaraan Satu Data, sehingga implementasinya memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah, perencanaan, statistik, teknologi informasi, dan seluruh produsen data.

Analisis: Apabila pelaksanaan terlalu dominan ditempatkan pada fungsi pembangunan aplikasi atau publikasi portal, terdapat risiko aspek substantif—seperti standardisasi, penetapan data prioritas, validasi, dan pemanfaatan data—tidak berkembang secara seimbang.

B. Analisis Kelembagaan

Aktor	Fokus tanggung jawab kebijakan
Kepala Daerah	Arah kebijakan dan komitmen penyelenggaraan
Bappeda Litbang	Keterkaitan data dengan perencanaan, indikator pembangunan, dan evaluasi
DKISP	Tata kelola teknologi, portal, integrasi, infrastruktur, dan interoperabilitas
BPS	Pembinaan statistik, metodologi, standar, dan kualitas statistik sesuai kewenangan
Perangkat daerah	Produksi, pemeriksaan, pemutakhiran, dan pertanggungjawaban data sektoral
Forum Satu Data	Koordinasi, kesepakatan data prioritas, dan penyelesaian isu lintas sektor

Perlu mekanisme kerja yang mengikat, bukan sekadar pembentukan tim. Tim perlu agenda kerja, target, indikator, jadwal koordinasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan evaluasi.

C. Analisis Teknologi

Portal Satu Data Kota Tarakan dapat menjadi instrumen implementasi kebijakan apabila dirancang sebagai platform tata kelola data dan terhubung dengan proses kerja perangkat daerah. Komponen yang direkomendasikan meliputi:

- Katalog data untuk inventarisasi dataset perangkat daerah.
- Metadata dan standar data: definisi, satuan, periode, sumber, indikator, dan metodologi.
- Workflow verifikasi: pengajuan, pemeriksaan, koreksi, persetujuan, dan publikasi.
- Integrasi dan API untuk pertukaran data dengan aplikasi sektoral.
- Analitik dan dashboard untuk visualisasi indikator pembangunan.

Portal perlu mendukung proses pengelolaan data dari awal hingga akhir, bukan hanya menampilkan data yang telah dikumpulkan.

D. Analisis Pemanfaatan Data

Bidang	Contoh pemanfaatan
Kesehatan	Pemetaan stunting, penyakit, fasilitas kesehatan, dan wilayah prioritas
Pendidikan	Analisis peserta didik, sekolah, sarana pendidikan, dan pemerataan
Sosial	Identifikasi kelompok rentan dan sinkronisasi bantuan sosial
Infrastruktur	Pemetaan jalan, drainase, utilitas, kondisi dan kebutuhan infrastruktur
Lingkungan	Pemantauan sampah, kualitas lingkungan, dan kawasan rawan
Ekonomi	Analisis UMKM, perdagangan, inflasi lokal, dan potensi ekonomi
Pemerintahan	Dashboard kinerja, capaian program, dan evaluasi pembangunan

Keberhasilan Satu Data seharusnya diukur dari meningkatnya kualitas keputusan pemerintah, bukan semata-mata dari banyaknya dataset yang diunggah ke portal.

4. Alternatif Kebijakan

Alternatif	Pendekatan	Risiko / kelemahan
1. Mempertahankan pola berjalan	Melanjutkan pengumpulan dan publikasi data melalui mekanisme yang ada	Perbaikan tata kelola lambat; koordinasi tidak konsisten; data kurang dimanfaatkan
2. Penguatan sistem dan portal	Mengembangkan portal, katalog, metadata, dashboard, dan pertukaran data	Sistem berkembang, tetapi kepatuhan PD dan kualitas data belum tentu meningkat

Alternatif	Pendekatan	Risiko / kelemahan
3. Penguatan tata kelola terintegrasi	Mengintegrasikan regulasi, kelembagaan, SDM, proses, standar, teknologi, evaluasi, dan pemanfaatan data	Memerlukan komitmen lintas PD, tetapi lebih berkelanjutan

Matriks penilaian alternatif (skala 1–5; penilaian analitis awal, bukan hasil pengukuran resmi)

Kriteria	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3
Biaya/kemudahan awal	5	3	2
Penguatan kualitas data	2	3	5
Integrasi lintas PD	1	3	5
Keberlanjutan	2	3	5
Pemanfaatan untuk kebijakan	1	3	5
Total	11	15	22

Alternatif 3 direkomendasikan karena lebih mampu menyelesaikan akar permasalahan Satu Data. Pengembangan portal tetap dilakukan, tetapi berada dalam kerangka tata kelola yang jelas.

5. Rekomendasi Kebijakan Kota Tarakan

Rekomendasi: Penguatan Tata Kelola Satu Data Kota Tarakan Berbasis Data Prioritas, Integrasi Sistem, dan Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan.

Kebijakan diarahkan untuk membangun tata kelola data pemerintah daerah yang terkoordinasi, menetapkan data prioritas, meningkatkan kualitas data sektoral, memperkuat peran Walidata dan Produsen Data, serta mendorong pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan.

Strategi 1 — Penguatan kelembagaan

- Memperkuat Forum Satu Data Kota Tarakan.
- Memperjelas pembagian peran Bappeda Litbang, DKISP, BPS, dan perangkat daerah.
- Menetapkan Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data secara jelas.
- Menetapkan koordinator serta penanggung jawab dataset pada setiap perangkat daerah.
- Memasukkan pelaksanaan Satu Data dalam agenda evaluasi kinerja perangkat daerah.

Strategi 2 — Penetapan data prioritas kota

- Menetapkan dataset yang dibutuhkan untuk mendukung visi dan prioritas kepala daerah.
- Mendukung RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, pelayanan publik, pengambilan keputusan strategis, evaluasi pembangunan, dan kebutuhan lintas perangkat daerah.

Strategi 3 — Standardisasi data sektoral

- Setiap dataset prioritas minimal memiliki nama dan definisi, indikator dan satuan, produsen dan penanggung jawab, sumber, periode, frekuensi pembaruan, metadata, format, metode pengumpulan, status validasi, dan klasifikasi akses.

Strategi 4 — Pengembangan Portal Satu Data

- Katalog dataset, metadata, formulir pengumpulan data, workflow verifikasi dan validasi, dashboard monitoring kepatuhan, dashboard indikator, API, pengelolaan data terbuka, serta statistik akses dan pemanfaatan.

Strategi 5 — Peningkatan kompetensi SDM

- Pembinaan tata kelola Satu Data, statistik sektoral, metadata dan standar, validasi kualitas, pengelolaan dataset, analisis dan visualisasi, keamanan, serta perlindungan data.

Strategi 6 — Monitoring, evaluasi, dan pengendalian

- Evaluasi kualitas, ketepatan waktu, kepatuhan, pemanfaatan, dan integrasi—bukan hanya jumlah dataset yang terkumpul.

6. Roadmap Implementasi Kebijakan (12 Bulan)

Tahap	Kegiatan
TW I — Konsolidasi kebijakan	Evaluasi Perwali 2/2024; inventarisasi dataset; evaluasi kelembagaan; penetapan data prioritas; penyusunan SOP dan rencana aksi.
TW II — Standardisasi dan pengembangan	Standar dan metadata; penanggung jawab data; pengembangan Portal; katalog data; pelatihan pengelola.
TW III — Implementasi dan integrasi	Pengumpulan dataset prioritas; verifikasi dan validasi; integrasi; publikasi data yang dapat dibagipakaikan; dashboard indikator.
TW IV — Evaluasi dan perbaikan	Evaluasi kepatuhan; penilaian kualitas dataset; evaluasi pemanfaatan; laporan Satu Data; perbaikan kebijakan dan rencana tahun berikutnya.

7. Indikator Keberhasilan Kebijakan

Indikator	Target usulan tahun pertama
PD memiliki penanggung jawab data	100%
Dataset prioritas diinventarisasi	100%
Dataset prioritas memiliki metadata	≥90%
Dataset prioritas diperbarui sesuai jadwal	≥90%
Dataset prioritas melalui validasi	≥90%
PD memenuhi jadwal penyampaian data	≥90%
Dataset prioritas tersedia dalam katalog	100%
Dataset dapat dibagipakaikan tersedia melalui portal	Bertahap sesuai klasifikasi
Dashboard indikator pembangunan prioritas	Minimal 1 dashboard strategis lintas sektor
Evaluasi penyelenggaraan Satu Data	1 kali setiap tahun

Target tersebut merupakan target usulan awal, bukan target yang ditetapkan Perwali. Penetapan final perlu disesuaikan dengan baseline hasil inventarisasi dan kapasitas daerah.

8. Kesimpulan Analisis Kebijakan

Kota Tarakan pada dasarnya telah memiliki fondasi regulasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia melalui Perwali Nomor 2 Tahun 2024. Tantangan utama yang perlu mendapat perhatian adalah kesenjangan antara keberadaan regulasi dengan efektivitas pelaksanaan tata kelola data di perangkat daerah.

Arah kebijakan sebaiknya tidak langsung berfokus pada penambahan aplikasi, melainkan pada penguatan tata kelola, penetapan data prioritas, standardisasi, koordinasi kelembagaan, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan data. Prioritas tindakan yang disarankan:

- Evaluasi implementasi Perwali 2 Tahun 2024 untuk mengukur pelaksanaan dan hambatan.
- Tetapkan data prioritas Kota Tarakan yang penting bagi pembangunan dan pelayanan publik.
- Perkuat SK Tim Satu Data untuk memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab lintas perangkat daerah.
- Bangun Portal Satu Data sebagai alat tata kelola, bukan sekadar media publikasi dataset.
- Terapkan monitoring kinerja Produsen Data dengan indikator kualitas, ketepatan waktu, validasi, dan pemanfaatan.
- Integrasikan Satu Data dengan perencanaan dan evaluasi pembangunan agar data digunakan Bappeda, pimpinan, dan perangkat daerah.

Kota Tarakan perlu menjadikan Satu Data sebagai program penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data. Bappeda Litbang menjadi penggerak kebutuhan dan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan; DKISP memperkuat platform, integrasi, dan infrastruktur data digital; BPS menjalankan pembinaan statistik sesuai

kewenangannya; dan perangkat daerah bertanggung jawab atas kualitas serta kemutakhiran data sektoral.

Dengan model tersebut, Portal Satu Data Kota Tarakan dapat berkembang menjadi infrastruktur pendukung pengambilan keputusan pemerintah kota dan mendukung transformasi menuju pemerintahan digital.

9. Referensi Regulasi dan Sumber

- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Tarakan.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Tautan rujukan

- JDIH Kota Tarakan — Perwali No. 2 Tahun 2024: jdih.tarakankota.go.id/produk-hukum-daerah/perwali/942
- JDIH BPK — Perwali No. 2 Tahun 2024: peraturan.bpk.go.id — Perwali Tarakan No. 2 Tahun 2024
- PDF Perwali No. 2 Tahun 2024: Unduh PDF Perwali Tarakan 02-2024

Dokumen ini merupakan analisis kebijakan awal untuk bahan perencanaan dan pembahasan. Identifikasi permasalahan, target, dan rekomendasi perlu ditindaklanjuti dengan verifikasi regulasi, inventarisasi data, serta konsultasi lintas perangkat daerah.